

ABSTRAK

PARIWISATA, PENGETASAN KEMISKINAN DAN MDGs

Heri Wahyudi- heriw@ut.ac.id
UPBJJ-UT Denpasar

Pariwisata merupakan sebuah industri yang berkembang, dinamis, dan interaktif. Industri ini seakan tidak mengenal waktu, perkembangan yang semakin pesat disebabkan karena kebutuhan manusia untuk berekreasi semakin meningkat dan industri pariwisata ini bagaikan jantung yang menggerakkan roda perekonomian serta salah satu industri terbesar dan menjadi sektor andalan di dalam pembangunan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan serta pengetasan kemiskinan. Tingginya investasi mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan devisa, peningkatan pendapatan pemerintah dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Kesemuanya ini juga berdampak pada dinamika masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta mensukseskan program Perserikatan Bangsa-bangsa berkaitan dengan Millennium Development Goals (MDGs).

Tujuan MDGs yaitu pengentasan kemiskinan, tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan masih jauh dari harapan dan kenyataan, tingginya tingkat kemiskinan dan kehidupan yang belum sejahtera bertolak belakang dengan cita-cita bangsa serta program Perserikatan Bangsa-bangsa berkaitan dengan Millennium Development Goals (MDGs). Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) di Indonesia belum sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa, kebijakan-kebijakan pembangunan industri pariwisata dan penyediaan lapangan pekerjaan serta pengetasan kemiskinan belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat sebaliknya kemiskinan masih banyak ditemukan yang berdampak terhadap pengentasan kemiskinan.

Kata-kata kunci: Pariwisata sektor andalan Pembangunan ekonomi, Pengetasan kemiskinan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan MDGs di Indonesia belum sesuai harapan.

I. Pendahuluan

Pariwisata sebagai suatu industri memiliki cakupan yang sangat luas baik dari segi subyek, obyek, maupun aktivitasnya. Perkembangan pariwisata yang semakin pesat disebabkan karena kebutuhan manusia untuk berekreasi semakin meningkat. Berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata bermunculan, tumbuh dan berkembangnya dengan pesat. Industri pariwisata ini bagaikan jantung yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Tujuan utama dari kegiatan pariwisata yang dilakukannya adalah untuk memperoleh kesenangan atau menghilangkan perasaan tertekan karena rutinitas kerja. Jadi dalam hal ini perolehan kepuasan dari kegiatan yang dilakukan wisatawan menjadi sangat penting. Selama ini banyak ditemukan defenisi mengenai wisatawan yang masing-masing digunakan oleh negara pengembangannya, sehingga untuk menganalisisnya tidak begitu mudah.

Konsep “wisatawan” berasal dari kata dalam bahasa Sansekerta “wisata” yang berarti “perjalanan” yang sama atau dapat disamakan dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris. Jadi orang yang melakukan perjalanan dalam pengertian ini, maka wisatawan sama artinya dengan kata “traveler” karena dalam bahasa Indonesia sudah merupakan kelaziman memakai akhiran “wan” untuk menyatakan orang dengan profesinya, keahliannya, keadaanya jabatannya dan kedudukan seseorang. Jadi kata “wisatawan” dalam beberapa hal berbeda dengan “tourist” dalam bahasa Inggris (RG. Soekadijo,2000).

Pariwisata menurut Yoeti (2001;47) adalah kegiatan bersenang-senang. Syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan wisata, apabila (1) perjalanan di lakukan dari suatu tempat ke tempat lain, di luar tempat kediaman orang itu biasa tinggal; (2) perjalanan yang dilakukan minimal 24 jam atau lebih; (3) tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang, dan tidak untuk mencari nafkah atau bekerja di tempat atau negara yang dikunjungi; dan (4) orang tersebut semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjunginya dan uang yang dibelanjakannya dibawah dari negara asalnya atau tempat tinggalnya semula dan bukan dicari atau diperoleh di tempat kota, atau negara yang dikunjunginya. Pengeluaran wisatawan merupakan devisa di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengetasan kemiskinan, peningkatan pembangunan pariwisata serta mensukseskan program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan Millennium Development Goals (MDGs)

Pembangunan pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu negeri, dan dunia. Sektor ini memberikan peluang bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Para turis yang berkunjung pada suatu negara membawa devisa ke negara

tersebut. Dengan devisa, maka negara akan memperoleh dana pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Dengan demikian devisa meningkatkan perekonomian negara dan dunia. Karena itu, maka sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mengintegrasikan kemajuan perekonomian pada berbagai dimensi pada skala nasional, regional, dan global.

Adapun kemiskinan merupakan permasalahan nasional, regional, dan global yang tidak bisa dibiarkan, sebab menyengsarakan umat manusia. Mengetaskan kemiskinan memerlukan dana besar. Salah satu cara mengentaskan kemiskinan rakyat adalah melibatkan rakyat miskin dalam berbagai kegiatan integratif dengan bisnis pariwisata serta mensukseskan program PBB berkaitan dengan Millennium Development Goals (MDGs) berkaitan dengan mengakhiri kemiskinan dan kelaparan.

II. Dampak Ekonomi Pengembangan Pariwisata

Pariwisata secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Pariwisata akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan pendapatan masyarakat untuk melakukan perjalanan pariwisata.

Pengembangan pariwisata banyak mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi jika tidak direncanakan dengan baik, akan menimbulkan dampak yang cukup banyak. Dampak ekonomi yang dimaksud adalah:

1. Pekerjaan yang diciptakan melalui pariwisata mungkin rendah bayarannya dan memerlukan sedikit keterampilan.
2. Peningkatan harga mungkin merupakan hasil dari bisnis lokal mencoba meningkatkan keuntungan atau menutupi biaya karyawan tambahan.
3. Nilai properti meningkat, ini terjadi jika masyarakat menjadi “ hot spot” seorang turis. Hal ini akan mengakibatkan pajak properti yang lebih tinggi yang mungkin kurang baik untuk penduduk lokal.
4. Jika pariwisata musiman di tempat tujuan, jadi juga akan injeksi pendapatan ke masyarakat.
5. Penyediaan layanan kesehatan dan layanan polisi bisa meningkat selama musim wisata dengan mengorbankan basis pajak daerah.
6. Keterjangkauan dan ketersediaan perumahan staf bisa menimbulkan masalah.

Disamping itu juga dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar (Cohen, 1984) yaitu :

1. Dampak terhadap penerimaan devisa,

2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat,
3. Dampak terhadap kesempatan kerja,
4. Dampak terhadap harga-harga,
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan,
6. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol,
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Disamping itu juga permasalahan pariwisata yang muncul kepermukaan, yakni rendahnya kualitas pelayanan pariwisata, rendahnya jumlah nilai dan investasi, ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, perusakan lingkungan, keamanan, kebersihan dan ketertiban destinasi, masyarakat tidak siap menjadi destinasi wisata, lemahnya koordinasi, peran serta pelaku usaha tidak sinkron dan tidak harmonis, citra destinasi yang negatif, aksesibilitas, iklim usaha tidak kondusif, dan konektivitas

Dampak-dampak negatif tersebut harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian yang bersifat jangka panjang bagi suatu destinasi pariwisata. Pertama, ketika suatu wilayah tertentu berkembang menjadi destinasi pariwisata, maka permintaan akan produk lokal dan tanah di wilayah tersebut akan meningkat, sehingga harga akan terus meningkat. Kedua, di dalam hasil penelitian the United Nation Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) disebutkan bahwa sebagian keuntungan yang dihasilkan dari sektor pariwisata internasional akan kembali ke negara asal wisatawan. Ketiga, kegiatan di sektor pariwisata dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius. Keempat, politisasi sektor pariwisata juga dapat terjadi dalam hal-hal tertentu. Pada umumnya pemerintah di negara maju memiliki posisi tawar (bargaining position) yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara berkembang dalam hal menetapkan kebijakan lalu lintas warga negaranya ke luar negeri. Kelima, sektor pariwisata dapat menimbulkan benturan ditinjau dari aspek sosial dan budaya.(M.L. Narasaiah).

Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara/daerah pariwisata telah menjadi penghasil devisa terbesar. Devisa yang diterima bagi Indonesia secara berturut-turut pada tahun 1996,1997,1998,1999, dan 2000 adalah sebesar 6,307,69; 5,321.46;4,331.09; 4,710.22; dan 5,748,80 juta dolar AS (Santosa 2001). Antara dan Parining (1999) mengemukakan bahwa pariwisata mempunyai keterkaitan ekonomi yang sangat erat dengan banyak sektor, melalui apa yang disebut open-loop effect dan induced-effect (di samping istilah yang sudah umum dikenal sebagai trickle-down effect dan multiplier effect). Dengan menggunakan model SAM (Social Accounting Matrix), ditemukan bahwa pengaruh pengeluaran wisatawan sangat signifikan terhadap

denyut nadi perekonomian nasional.

Dalam segi penyerapan tenaga kerja, WTO melukiskan bahwa satu dari delapan pekerja di dunia ini kehidupannya tergantung, langsung ataupun tidak langsung dari pariwisata. Pada tahun 1995, pariwisata telah menciptakan kesempatan kerja secara langsung untuk 211 juta orang. Pada tahun 2001, pariwisata telah menciptakan kesempatan kerja bagi 207 juta orang, atau lebih dari 8% kesempatan kerja di seluruh dunia (UNEP, 2002). Pada tahun 2005, diperkirakan pariwisata akan menciptakan lapangan kerja bagi 305 juta orang. Kalau mesin penggerak dalam penciptaan tenaga kerja pada abad 19 adalah pertanian, dan pada abad 20 adalah industri manufaktur, maka abad 21, mesin penggerak tersebut adalah pariwisata (Dawid J. De Villier, 1999; Salah Wahab, 1999). Pada tahun 2001, pariwisata menciptakan investasi sebesar 630 miliar dolar AS, atau sekitar 9% dari seluruh investasi dunia (UNEP, 2002). Bagi Indonesia, peranan pariwisata semakin terasa, terutama setelah melemahnya peranan minyak dan gas, walaupun nilai nominalnya dalam dolar sedikit mengalami fluktuasi.

Dengan pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, pariwisata sering disebut sebagai *passport to development, new kind of sugar, tool for regional development, new kind of sugar, tool for regional development, invisible export, non-polluting industry*, dan sebagainya. (Pitana, 2002).

Peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi sudah jelas dari angka-angka statistik yang dikemukakan di atas. Tetapi pariwisata bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial, budaya, politik dan seterusnya. Pariwisata adalah suatu sistem yang multikompleks, dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi antara sesama. Dalam dasarwasa terakhir, pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat dan menjadi salah satu *prime-mover* dalam perubahan sosial budaya.

III. Pengetasan Kemiskinan dan MDGs

Arti kemiskinan manusia secara umum adalah “kurangnya kemampuan esensial manusia terutama dalam hal “ke-melak-huruf-an (kemampuan membaca; literacy) serta tingkat kesehatan dan gizi”. Selain itu diartikan pula sebagai kurangnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Defenisi atau pengertian kemiskinan perlu pula dibedakan antara kemiskinan absolut (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relatif poverty*). Kemiskinan absolut diidikasikan dengan suatu tingkat kemiskinan yang di bawah itu kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak

dapat dipenuhi. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu tingkat kemiskinan dalam hubungannya dengan suatu rasio garis kemiskinan absolut atau proporsi distribusi pendapatan (kesejahteraan) yang timpang (tidak merata) (ADB,1999:26)

Dalam sebuah laporan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berjudul “ Report on internasional Definition and Measurement of Standards and level of living”, telah dikemukakan dua belas macam komponen sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan minimum manusia. Tetapi komponen-komponen tersebut adalah : Kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan, kondisi pekerjaan, situasi kesempatan kerja, sandang, perumahan, rekreasi dan hiburan, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.(Hendara,1986)

Badan Pusat Statistik menegaskan, angka penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2006 terus menurun meski jumlah penduduk hampir miskin juga besar. “Sejak 2006, data penduduk miskin turun dari 39,3 juta menjadi 31,02 juta dengan memakai garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan. (Kecuk Suhariyanto,2011). Data untuk menghitung penerima beras miskin adalah data kemiskinan mikro yang merupakan jumlah penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa ditambah penduduk hampir miskin yang mencapai 29,38 juta jiwa. Upaya penanggulangan kemiskinan, jangan hanya mengandalkan kebijakan di bidang sosial, politik, hukum, dan kelembagaan karena upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu lintas sektor, dan berkesinambungan khususnya ekonomi berbasis rakyat.

Dalam pembangunan nasional, rakyat adalah subjek pembangunan, pembangunan untuk rakyat, bukan sebaliknya. Sebagaimana ditegaskan dalam cita-cita nasional (Pembukaan UUD 1945). Bahwa pemerintahan negara wajib” ... melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa... ” serta berpedoman pada pasal 27 ayat 2 bahwa “... Tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ...”. Jadi, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari tuntutan untuk membangun dan memajukan rakyat berdasarkan kemandirian.

Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi . Para pengambil keputusan memandang pertumbuhan output nasional dan regional yang dinyatakan dalam pendapatan perkapita atau GNP dapat mendorong kegiatan ekonomi lainnya (multiplier effect), yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang berusaha. Bila skenario ini berjalan sesuai dengan asumsi tersebut, kemiskinan secara tidak langsung dapat dientaskan. Namun pengalaman menunjukkan peningkatan produk domestik bruto (GNP)

tidak dengan sendirinya membawa peningkatan standar hidup masyarakat secara keseluruhan maupun individu.

Menurut Harrod-Domar, tingkat pertumbuhan GNP ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, serta rasio modal-ouput nasional secara lebih spesifik, menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara “positip” berbanding lurus dengan rasio tabungan (yakni semakin banyak GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka pada akhirnya nanti akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP yang ditabung dan diinvestasikan, maka pada akhirnya nanti akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP yang dihasilkannya) dan secara “negatif” atau perbandingan terbalik terhadap rasio modal-output nasional, maka tingkat pertumbuhan GNP akan semakin rendah. (Todaro,1989)

Ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin, membuat output pertumbuhan tersebut tidak terdistribusi secara merata . Teori tickle down effect yang mendasari kebijakan di atas tidak berlaku sepenuhnya. Kemakmuran tersebut umumnya hanya akan ” menetes” kepada lapisan masyarakat tertentu yang secara komperatif memiliki pengetahuan, keterampilan, daya saing, dan absorptive eapacity yang lebih baik.

Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak para ahli menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlunya peranan pemerintah, maka pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting artinya. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat.

IV. Solusi Alternatif

Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yaitu yang menjamin bahwa keuntungan yang optimal akan diperoleh secara berkelanjutan, hanya dapat diwujudkan dengan pendekatan (kebijakan) yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Pembangunan kepariwisataan juga harus menganut prinsip “ di sini senang, di sana senang”. Artinya, prinsip tersebut harus dapat menyebabkan wisatawan kembali ke rumah dengan membawa memeori yang indah tentang destinasi pariwisata atau daya tarik wisata karena telah memberikan kenangan manis untuk wisatawan dan mengajarkan sesuatu yang berharga bagi wisatawan (selain memperoleh keuntungan ekonomi) .

Dikaitkan dengan pemanfaatan sektor pariwisata dalam mendukung upaya pengetasan kemiskinan (poverty alleviation), perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak boleh diartikan sebagai secara sengaja menempatkan pelaku dalam industri pariwisata-khususnya tenaga kerja dan pengusaha kecil dan menengah – sebagai pihak yang perlu dikasihani, sehingga bisnis pariwisata menjadi sebuah bisnis berdasarkan “ belas kasihan”. Profesionalisme mereka harus ditingkatkan secara berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan kemudian mendorong peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan di sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting . Industri pariwisata dapat mengurangi tingkat kemiskinan karena karakteristiknya yang khas sebagai berikut:

1. Konsumen datang ke tempat tujuan sehingga membuka peluang bagi penduduk lokal untuk memasarkan berbagai komoditi dan pelayanan;
2. Membuka peluang bagi upaya untuk mendiversifikasikan ekonomi lokal yang dapat menyentuh kawasan-kawasan marginal;
3. Membuka peluang bagi upaya usaha-usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah yang terjangkau oleh kaum miskin; dan
4. Tidak hanya tergantung pada modal, akan tetapi juga tergantung pada modal budaya (cultural capital) dan modal alam (natural capital) yang seringkali merupakan aset yang dimiliki oleh kaum miskin.(Tjokrowinoto,2005).

Pemanfaatan potensi sumber daya alam sering tidak dilakukan secara optimal dan cenderung eksploitatif. Kecenderungan ini perlu segera dibenahi salah satunya melalui pengembangan industri pariwisata dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan budaya berbasis pada pengembangan kawasan secara terpadu. Potensi wisata alam dan budaya berbasis pada pengembangan kawasan secara terpadu.

Potensi wisata alam dan budaya pada satu kawasan adalah dalam upaya mensinergikan berbagai kepentingan sebagaimana makna dari suatu kawasan merupakan keterpaduan penegelolaan yang memiliki nilai promosi yaitu one stop service, intinya pada suatu tempat dapat diberikan pelayanan dari berbagai jasa usaha pariwisata dan dapat menikmati berbagai sajian terpadu untuk tercapainya optimalisasi aset kepariwisataan dan kebudayaan sebagai langkah pemberdayaan masyarakat, menuju

kepada pendekatan penting Community Based Tourism dan Comunit Based Culture Centered.

Pariwisata dan kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung mempunyai keterkaitan khususnya masyarakat yang mengatungkan pendapatan melalui pariwisata. Banyak program pengetasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi masih dirasakan belum banyak keberhasilannya, hasil yang dicapai tidak efisiensi dan tidak tepat sasaran. Di sisi lain, banyak yang belum mengerti bagaimana mengawali upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Berbagai forum, dari tingkat lokal hingga internasional, menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang memungkinkan adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memiliki ciri-ciri unik serta sejumlah karakter yang oleh Nasikun (2000:26-27) dikemukakan sebagai berikut: 1) Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitsnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karekter yang lebih unik diorganisasi dalam skala kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis wisata konvensional, 2) Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, 3) Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis berkaitan dengan pariwisata, pengentasan kemiskinan dan MDGs dapat disimpulkan:

- a. Pariwisata merupakan sektor andalan perekonomian dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pengetasan kemiskinan.

- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan pariwisata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang optimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan
- d. Penghapusan kemiskinan membutuhkan usaha bersama, pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dalam konteks kemitraan global untuk pembangunan lebih kuat dan lebih efektif melalui upaya-upaya mencapai cita-cita luhur Millennium Development Goals (MDGs).
- e. Tantangan dalam pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) sangat beraneka ragam berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan yang terbatas.

Daftar Pustaka

- Antara, M dan N. Parining. 1999. Keterkaitan antara Pariwisata dengan Pertanian di Bali: Tinjauan dengan Model Social Accounting Matrix. Paper disampaikan dalam Seminar Pariwisata Berkelanjutan menurut Perspektif Orang Bali. Puslit Kebudayaan dan Pariwisata Unud. Denpasar, 3 Agustus 1999.
- Cohen, Erik. 1984. ***The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Finding Annal of Tourisma Research 30: 236-66***
- Hendra, Esmara. 1986. Politik Perencanaan dan Pembangunan: Teori Kebijakan, dan Prospek Gremedia Jakarta
- Narasaiah, M.L. 2006. Tourism and World Trade Organization. New Delhi: Discovery Publishing House:5
- Pitana, I Gde. Pariwisata Wahana Pelestarian Kebudayaan dan Dinamika Masyarakat Bali. Orasi Pengukuhan Guru Besar dalam Pariwisata, Universitas Udayana. Denpasar, 15 Juni 2002.
- Soekadijo, R.G., 2000, Anatomi Pariwisata, Jakarta Gremedia Pustaka Utama
- Santosa, SP. 2001. Bahan Paparan untuk Gubernur Bali. Mimeo
- Todaro, Michael, P, 1989, Pembangunan Ekonomi di Negara Dunia Ketiga, Erlangga Jakarta.
- Tjokrowinoto, M. 2005. Pengurangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Perspektif Kebijakan Publik. Dalam Damanik, J., H.A. dan Raharjana, D.T (Ed). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata. Yogyakarta: Kepel Press:53.
- UNEP (United Nation Environment Programme). 2002. ***Industry as Patner for Sustainable Development: Tourism. UK: UNEP.***
- WTO (World Tourism Organisation). 2004. Tourism Barometer. Madrid: WTO
- Yoeti, Oka H.A. (ed). 2001. Ilmu Pariwisata: Sejarah Perkembangan, dan Prospeknya. Jakarta: Penerbit Pertja.

